

RENCANA AKSI/KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT  
DIVISI ADMINISTRASI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA AKSI/KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN		
1	TERWUJUDNYA LAYANAN ADMINISTRATIF DAN FASILITATIF KANTOR WILAYAH YANG EFEKTIF DAN EPISIEN	INDEKS KEPUJASAN LAYANAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH	3,1 INDEKS	SURVEI INTERNAL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH YANG DILAKSANAKAN OLEH DIVISI ADMINISTRASI	1. MELAKSANAKAN LAYANAN BMN	Rp 220.200.000	Rp 4.193.834.000	Rp 3.678.745.622	TW I	1. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN BMN	TW I	TELAH DILAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN BMN	LAPORAN WASDAL	TELAH DILAKSANAKAN	(KETERANGAN DETAIL CAPAIAN)
					2. MELAKSANAKAN LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI	Rp 368.246.000				2. MELAKSANAKAN MONITORING DAN PELAPORAN BMN		-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	(KETERANGAN DETAIL CAPAIAN)
					3. MELAKSANAKAN LAYANAN PROTOKOLER	Rp 39.420.000				3. MELAKSANAKAN PENGAMANAN BMN SATUAN KERJA WILAYAH		-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	(KETERANGAN DETAIL CAPAIAN)
					4. MELAKSANAKAN LAYANAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA INTERNAL	Rp 78.640.000				4. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK		TELAH DILAKUKAN PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK	PEMASANGAN IKLAN PADA MEDIA MASA TERKAIT CAPAIAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT	TELAH DILAKSANAKAN	
					5. MELAKSANAKAN LAYANAN UMUM	Rp 170.140.000				5. MELAKSANAKAN KEGIATAN KEHUMASAN		TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN TERAIT KEHUMASAN	LAPORAN KEHUMASAN		
					6. MELAKSANAKAN LAYANAN PERKANTORAN	Rp 13.140.063.000				6. MELAKSANAKAN KEGIATAN KOORDINASI KEPROTOKOLERAN		-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	
					7. MELAKSANAKAN LAYANAN SARANA INTERNAL	Rp 915.326.000				7. MELAKSANAKAN KEPROTOKOLERAN		TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN TERAIT KEPROTOKOLERAN KEHUMASAN	LAPORAN KEHUMASAN	TELAH DILAKSANAKAN	
					8. MELAKSANAKAN Layanan Manajemen SDM	Rp 602.054.000				8. MEMFASILITASI KETATALAKSANAAN		-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	
					9. MELAKSANAKAN Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 425.240.000				9. MEMFASILITASI KELEMBAGAAN		-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	
					10. MELAKSANAKAN Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 527.590.000				10. MELAKSANAKAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARJAS/ JIKPBJ		TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN TERAIT PENGELOLAAN BARJAS	TERSUSUNNYA RUP	TELAH DILAKSANAKAN	
					11. MELAKSANAKAN Layanan Manajemen Keuangan	Rp 734.060.000				11. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN		-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	
					12. MELAKSANAKAN Layanan Reformasi Kinerja	Rp 367.310.000				12. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KESEHATAN PEGAWAI		-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	
					13. MELAKSANAKAN Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp 55.440.000				13. MELAKUKAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN		TELAH DILAKSANAKAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI	DAFTAR PEMBAYARAN GAJI DAN KOLEKTIF DAN TUNJANGAN	TELAH DILAKSANAKAN	
									14. MELAKSANAKAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR		DALAM PROSES PELAKSANAAN PEMELIHARAAN	-	-	DALAM PROSES	
									15. MELAKSANAKAN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI		-	-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	
									16. MELAKSANAKAN PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN		-	-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	
									17. MELAKSANAKAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN		-	-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	
									18. MELAKSANAKAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN		TELAH DILAKSANAKAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PEGAWAI	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN	TELAH DILAKSANAKAN		
									19. MELAKSANAKAN LAYANAN PERENCANAAN		TELAH DILAKSANAKAN KEGIATAN SUPERVISI LKJIP SATUAN KERJA TAHUN 2023	LKJIP KANWIL DAN UPT TAHUN 2023	TELAH DILAKSANAKAN		
									20. MELAKSANAKAN PENGANGGARAN		TELAH DILAKSANAKAN KEGIATAN ANALISA SARPAS KANTOR WILAYAH	LAPORAN ANALISA SARPAS	TELAH DILAKSANAKAN		
									21. MELAKSANAKAN KOORDINASI DAN KONSULTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		TELAH DILAKSANAKAN KOORDINASI DAN KONSULTASI KE BIRO PERENCANAAN DAN BIRO KEUANGAN	LAPORAN KOORDINASI DAN KONSULTASI	TELAH DILAKSANAKAN		

22. MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
23. MEMBERIKAN REKOMENDASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
24. MELAKUKAN PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO
25. MELAKSANAKAN SISTEM PENGENDALIAN INSTANSI PEMERINTAH (SPIP)
26. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN
27. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN
28. MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI
27. MELAKSANAKAN PEMBENTUKAN SATKER WBK/WBBM
28. MEMBENTUK UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI DAN GRATIFIKASI
29. MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BUDAYA ANTI KORUPSI
30. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KEARSIPAN

TELAH DILAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI EVALUASI CAPAIAN KINERJA	LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA	TELAH DILAKSANAKAN	
-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	
-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	
-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	
TELAH DILAKSANAKANNYA REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATKER DAN WILAYAH UNTUK SEMESTER II TA 2023	LAPORAN REKONSILIASI	TELAH DILAKSANAKAN	
TELAH DILAKSANAKANNYA REKONSILIASI TINGKAT WILAYAH DAN UNIT ES.I UNTUK SEMESTER II TA 2023	LAPORAN REKONSILIASI TINGKAT WILAYAH	TELAH DILAKSANAKAN	
-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN	
TELAH DILAKSANAKANNYA PEMBENTUKAN SATKER WBK/WBBM DI LP ENDE	LAPORAN PEMBENTUKAN SATKER WBK/WBBM PADA LP	TELAH DILAKSANAKAN	
-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	
-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	
-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA	
Rp 4.176.142.000	Rp -	TW II	TW II
1. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN BMN		(STATUS PELAKSANAAN)	(KETERANGAN DETAIL CAPAIAN)
2. MELAKSANAKAN MONITORING DAN PELAPORAN BMN		(STATUS PELAKSANAAN)	(KETERANGAN DETAIL CAPAIAN)
3. MELAKSANAKAN PENGAMANAN BMN SATUAN KERJA WILAYAH		(STATUS PELAKSANAAN)	(KETERANGAN DETAIL CAPAIAN)
4. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK			
5. MELAKSANAKAN KEGIATAN KEHUMASAN			
6. MELAKSANAKAN KEGIATAN KOORDINASI KEPROKTOKOLERAN			
7. MELAKSANAKAN KEPROKTOKOLERAN			
8. MEMFASILITASI KETATALAKSANAAN			
9. MEMFASILITASI KELEMBAGAAN			
10. MELAKSANAKAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARJAS/ UKPBJ			
11. MELAKSANAKAN			
12. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KESEHATAN PEGAWAI			
13. MELAKUKAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN			
14. MELAKSANAKAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAN KANTOR			
15. MELAKSANAKAN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI			
16. MELAKSANAKAN PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERIKANTORAN			
17. MELAKSANAKAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN			

						18. MELAKSANAKAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN								
						19. MELAKSANAKAN LAYANAN PERENCANAAN								
						20. MELAKSANAKAN PENGANGGARAN								
						21. MELAKSANAKAN KOORDINASI DAN KONSULTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN								
						22. MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA								
						23. MEMBERIKAN REKOMENDASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN								
						24. MELAKUKAN PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO								
						25. MELAKSANAKAN SISTEM PENGENDALIAN INSTANSI PEMERINTAH (SPIP)								
						26. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN KELUANGAN								
						27. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN								
						28. MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI								
						27. MELAKSANAKAN PEMBENTUKAN SATKER WBK/WBBM								
						28. MEMBENTUK UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI DAN GRATIFIKASI								
						29. MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BUDAYA ANTI KORUPSI								
						30. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KEARSIPAN								
						31. MELAKSANAKAN MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN KEARSIPAN								
Rp	4.545.429.000				TW III	1. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN BMN								
						2. MELAKSANAKAN MONITORING DAN PELAPORAN BMN								
						3. MELAKSANAKAN PENGAMANAN BMN SATUAN KERJA WILAYAH								
						4. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK								
						5. MELAKSANAKAN KEGIATAN KEHUMASAN								
						6. MELAKSANAKAN KEGIATAN KOORDINASI KEPROKTOKOLERAN								
						7. MELAKSANAKAN KEPROKTOKOLERAN								
						8. MEMFASILITASI KETATALAKSANAAN								
						9. MEMFASILITASI KELEMBAGAAN								
						10. MELAKSANAKAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARJAS/ LUKPBJ								
						11. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN								
						12. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KESEHATAN PEGAWAI								
						13. MELAKUKAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN								
						14. MELAKSANAKAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAN KANTOR								



																			11. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN																				
																			12. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KESEHATAN PEGAWAI																				
																			13. MELAKUKAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN																				
																			14. MELAKSANAKAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAN KANTOR																				
																			15. MELAKSANAKAN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI																				
																			16. MELAKSANAKAN PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN																				
																			17. MELAKSANAKAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN																				
																			18. MELAKSANAKAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN																				
																			19. MELAKSANAKAN LAYANAN PERENCANAAN																				
																			20. MELAKSANAKAN PENGANGGARAN																				
																			21. MELAKSANAKAN KOORDINASI DAN KONSULTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN																				
																			22. MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA																				
																			23. MEMBERIKAN REKOMENDASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN																				
																			24. MELAKUKAN PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO																				
																			25. MELAKSANAKAN SISTEM PENGENDALIAN INSTANSI PEMERINTAH (SPIP)																				
																			26. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN																				
																			27. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN																				
																			28. MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI																				
																			27. MELAKSANAKAN PEMBENTUKAN SATKER WBK/WBEM																				
																			28. MEMBENTUK UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI DAN GRATIFIKASI																				
																			29. MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BUDAYA ANTI KORUPSI																				
																			30. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KEARSIPAN																				
																			31. MELAKSANAKAN MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN KEARSIPAN																				

Mengetahui,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM NTT  
  
Marta D. Jone  
NIP. 196411261991032001





					Rp	45.510.000	Rp		TW II	Melakukan Monitoring terhadap Jumlah Tahanan dan WBP yang Hamil dan Menyusui dengan Pemenuhan Layanan	TW II		Laporan BINTORWASDAL terhadap Jumlah Tahanan dan Warga Binaan Perempuan yang Hamil dan Menyusui dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan				
					Rp	24.448.000	Rp		TW III	Melakukan Monitoring terhadap Jumlah Tahanan dan WBP yang Hamil dan Menyusui dengan Pemenuhan Layanan	TW III		Laporan BINTORWASDAL terhadap Jumlah Tahanan dan Warga Binaan Perempuan yang Hamil dan Menyusui dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan				
					Rp	33.540.000	Rp		TW IV	Melakukan Monitoring terhadap Jumlah Tahanan dan WBP yang Hamil dan Menyusui dengan Pemenuhan Layanan	TW IV		Laporan BINTORWASDAL terhadap Jumlah Tahanan dan Warga Binaan Perempuan yang Hamil dan Menyusui dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan				
Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan mental dikali 100%	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Lapas / Rutan / Lpka Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	Rp	-	Rp	-	Rp	-	TW I	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental	TW I		Laporan Data Tahanan/Anak binaan/Warga Binaan yang Mengalami Gangguan Mental yang Tertangani pada Lapas/Rutan/LPKA			
					Rp	-	Rp	-	Rp	-	TW II	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental	TW II		Laporan Data Tahanan/Anak binaan/Warga Binaan yang Mengalami Gangguan Mental yang Tertangani pada Lapas/Rutan/LPKA		
					Rp	-	Rp	-	Rp	-	TW III	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental	TW III		Laporan Data Tahanan/Anak binaan/Warga Binaan yang Mengalami Gangguan Mental yang Tertangani pada Lapas/Rutan/LPKA		
					Rp	-	Rp	-	Rp	-	TW IV	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental	TW IV		Laporan Data Tahanan/Anak binaan/Warga Binaan yang Mengalami Gangguan Mental yang Tertangani pada Lapas/Rutan/LPKA		
Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan Dikali 100%	Melakukan Pengawasan terhadap Lapas / Rutan / Lpka terhadap Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp	-	Rp	-	Rp	-	TW I	Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan	TW I		Laporan Pengawasan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas / Rutan / LPKA			
					Rp	-	Rp	-	Rp	-	TW II	Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan	TW II		Laporan Pengawasan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas / Rutan / LPKA		
					Rp	-	Rp	-	Rp	-	TW III	Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan	TW III		Laporan Pengawasan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas / Rutan / LPKA		

					Rp	-	Rp	-	TW IV	Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan	TW IV		Laporan Pengawasan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas / Rutan / LPKA			
Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Membutuhkan Layanan Kesehatan Dikali 100%	Melakukan Pengawasan pada Lapas/Rutan/Lpka terhadap Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp	-	Rp	-	TW I	Melakukan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)	TW I		Laporan Data Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas/Rutan/LPKA				
					Rp	-	Rp	-	TW II	Melakukan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)	TW II		Laporan Data Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas/Rutan/LPKA			
					Rp	-	Rp	-	TW III	Melakukan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)	TW III		Laporan Data Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas/Rutan/LPKA			
					Rp	-	Rp	-	TW IV	Melakukan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)	TW IV		Laporan Data Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas/Rutan/LPKA			
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Postif (Berhasil Sembuh)	90%	Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = ((A + B) : 2) x 100%	Melakukan Pengawasan pada Lapas/Rutan/Lpka yang Melakukan Penanganan Penyakit Menular	Rp	-	Rp	-	TW I	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki	TW I		Laporang Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapidana/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular				
					Rp	-	Rp	-	TW II	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki	TW II		Laporang Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapidana/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular			
					Rp	-	Rp	-	TW III	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki	TW III		Laporang Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapidana/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular			
					Rp	-	Rp	-	TW IV	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki	TW IV		Laporang Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapidana/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular			
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika	29%	Jumlah Perubahan Kualitas Hidup Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika Dibagi Jumlah Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Dikali 100%	Melakukan Pengawasan pada Kegiatan Rehabilitasi yang Dilaksanakan oleh Lapas Narkotika kepada Tahanan/Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Narkotika yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi	Rp	155.700.000	Rp	52.202.000	Rp	47.968.880	TW I	Melakukan Pengawasan terhadap Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	TW I	MELAKUKAN MONEV PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Pengawasan Pelaksanaan Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	TELAH DILAKSANAKAN	



						Rp	45.510.000	Rp		TW II	Melakukan Pengawasan terhadap Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	TW II		Laporan Pengawasan Pelaksanaan Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika				
						Rp	24.448.000	Rp	-	TW III	Melakukan Pengawasan terhadap Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	TW III		Laporan Pengawasan Pelaksanaan Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika				
						Rp	33.540.000	Rp	-	TW IV	Melakukan Pengawasan terhadap Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	TW IV		Laporan Pengawasan Pelaksanaan Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika				
17	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	100%	Jumlah Tahanan Overstaying dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%	Melakukan Pengawasan Jumlah Tahanan Overstaying pada Lapas/Rutan/LPKA serta Koordinasi dengan aparat penegak hukum maupun mitra ketiga terkait penahanan	Rp	11.820.000	Rp	-	Rp	-	TW I	Melakukan Penghitungan pada Jumlah Data Tahanan yang Sudah Lewat Masa Penahanannya dan Tidak atau Belum Ada Perpanjangan Penahanan	TW I		Laporan Penghitungan pada Jumlah Data Tahanan yang Sudah Lewat Masa Penahanannya dan Tidak atau Belum Ada Perpanjangan Penahanan		
								Rp	11.820.000	Rp	-	TW II	Melakukan Koordinasi DILKUMJAKPOL, Pemda dan TNI	TW II		Laporan Kegiatan Forum DILKUMJAKPOL, Pemda, dan TNI		
								Rp	-	Rp	-	TW III	Melakukan Penghitungan pada Jumlah Data Tahanan yang Sudah Lewat Masa Penahanannya dan Tidak atau Belum Ada Perpanjangan Penahanan	TW III		Laporan Penghitungan pada Jumlah Data Tahanan yang Sudah Lewat Masa Penahanannya dan Tidak atau Belum Ada Perpanjangan Penahanan		
								Rp	-	Rp	-	TW IV	Melakukan Penghitungan pada Jumlah Data Tahanan yang Sudah Lewat Masa Penahanannya dan Tidak atau Belum Ada Perpanjangan Penahanan	TW IV		Laporan Penghitungan pada Jumlah Data Tahanan yang Sudah Lewat Masa Penahanannya dan Tidak atau Belum Ada Perpanjangan Penahanan		
	Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	Hasil Pengurangan Dibagi dengan Jumlah Tahanan Dikali 100%	Melakukan Pengawasan pada Lapas/Rutan/Lpka terhadap Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	Rp	-	Rp	-	Rp	-	TW I	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	TW I		Laporan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum			
							Rp	-	Rp	-	TW II	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	TW II		Laporan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum			
							Rp	-	Rp	-	TW III	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	TW III		Laporan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum			
							Rp	-	Rp	-	TW IV	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	TW IV		Laporan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum			
	Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100%	Hasil Pengurangan Dibagi dengan Jumlah Tahanan Dikali 100%	Melakukan Pengawasan terhadap Lapas / Rutan / Lpka Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	Rp	-	Rp	-	Rp	-	TW I	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	TW I		Laporan Monitoring Data Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum			
							Rp	-	Rp	-	TW II	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	TW II		Laporan Monitoring Data Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum			
							Rp	-	Rp	-	TW III	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	TW III		Laporan Monitoring Data Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum			
							Rp	-	Rp	-	TW IV	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	TW IV		Laporan Monitoring Data Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum			

18	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian	75%	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian Dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%	Melakukan Monev pada Bidang Pembinaan/Pelayanan Tahanan/Registrasi di Lapas/Rutan/LPKA	Rp	155.700.000	Rp	52.202.000	Rp	47.968.880	TW I	Melakukan Monev pada Bidang Pembinaan/Pelayanan Tahanan/Registrasi di Lapas/Rutan/LPKA untuk Melakukan Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian dengan Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan	TW I	MELAKUKAN MONEV PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Monitoring dan Evaluasi	TELAH DILAKSANAKAN	
						Rp	45.510.000	Rp	-	TW II	Melakukan Monev pada Bidang Pembinaan/Pelayanan Tahanan/Registrasi di Lapas/Rutan/LPKA untuk Melakukan Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian dengan Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan	TW II		Laporan Monitoring dan Evaluasi				
						Rp	24.448.000	Rp	-	TW III	Melakukan Monev pada Bidang Pembinaan/Pelayanan Tahanan/Registrasi di Lapas/Rutan/LPKA untuk Melakukan Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian dengan Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan	TW III		Laporan Monitoring dan Evaluasi				
						Rp	33.540.000	Rp	-	TW IV	Melakukan Monev pada Bidang Pembinaan/Pelayanan Tahanan/Registrasi di Lapas/Rutan/LPKA untuk Melakukan Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian dengan Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan	TW IV		Laporan Monitoring dan Evaluasi				
	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	100%	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%	Melakukan Monev pada Buku Remisi Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif pada Lapas/Rutan/LPKA	Rp	155.700.000	Rp	52.202.000	Rp	32.636.800	TW I	Melakukan Penghitungan terhadap Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi	TW I	MELAKUKAN MONEV PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Monev Pemeriksaan Buku Remisi Narapidana	TELAH DILAKSANAKAN		
					Rp	45.510.000	Rp	-	TW II	Melakukan Penghitungan terhadap Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi	TW II		Laporan Monev Pemeriksaan Buku Remisi Narapidana					

					Rp	24.448.000	Rp		TW III	Melakukan Penghitungan terhadap Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi	TW III		Laporan Monev Pemeriksaan Buku Remisi Narapidana			
					Rp	33.540.000	Rp		TW IV	Melakukan Penghitungan terhadap Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi	TW IV		Laporan Monev Pemeriksaan Buku Remisi Narapidana			
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	90%	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial pada Dikali 100%	Melakukan Pemeriksaan dan Pengecekan pada Buku Integrasi Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Program Reintegrasi Sosial pada Lapas/Rutan/LPKA	Rp	155.700.000	Rp	52.202.000	Rp	32.636.800	TW I	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial	TW I	MELAKUKAN MONEV PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Integrasi Narapidana	TELAH DILAKSANAKAN	
					Rp	45.510.000	Rp	-	TW II	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial	TW II		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Integrasi Narapidana			
					Rp	24.448.000	Rp	-	TW III	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial	TW III		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Integrasi Narapidana			
					Rp	33.540.000	Rp	-	TW IV	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial	TW IV		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Integrasi Narapidana			
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	90%	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan Formal Dikali 100%	Melakukan Pemeriksaan dan Pengecekan pada Buku Pembinaan Kepribadian (Pendidikan) Narapidana yang Mendapatkan Pendidikan pada Lapas/Rutan/LPKA	Rp	155.700.000	Rp	52.202.000	Rp	47.968.880	TW I	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan	TW I	MELAKUKAN MONEV PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Pembinaan Kepribadian (Pendidikan)	TELAH DILAKSANAKAN	
					Rp	45.510.000	Rp	-	TW II	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan	TW II		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Pembinaan Kepribadian (Pendidikan)			

					Rp	24.448.000	Rp		TW III	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan	TW III		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Pembinaan Kepribadian (Pendidikan)			
					Rp	33.540.000	Rp	-	TW IV	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan	TW IV		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Pembinaan Kepribadian (Pendidikan)			
Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19%	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan, Vokasi bagi Narapidana pada Lapas/Rutan/LPKA	Rp	155.700.000	Rp	52.202.000	Rp	32.636.800	TW I	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dengan Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan	TW I	MELAKUKAN MONEV PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Monev Kegiatan Pelatihan Vokasi bag Narapidana pada Lapas/Rutan/LPKA	TELAH DILAKSANAKAN	
					Rp	45.510.000	Rp	-	TW II	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dengan Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan	TW II		Laporan Monev Kegiatan Pelatihan Vokasi bag Narapidana pada Lapas/Rutan/LPKA			
					Rp	24.448.000	Rp	-	TW III	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dengan Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan	TW III		Laporan Monev Kegiatan Pelatihan Vokasi bag Narapidana pada Lapas/Rutan/LPKA			
					Rp	33.540.000	Rp	-	TW IV	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dengan Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan	TW IV		Laporan Monev Kegiatan Pelatihan Vokasi bag Narapidana pada Lapas/Rutan/LPKA			
Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat	34%	Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi Dibagi Jumlah Narapidana Dikali 100%	Melakukan Pemeriksaan dan Pengecekan pada Buku Bimbingan Kerja (Bimker), serta Sarana dan Prasarana pada Lapas/Rutan/LPKA	Rp	155.700.000	Rp	52.202.000	Rp	47.968.880	TW I	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi dengan Jumlah Narapidana	TW I	MELAKUKAN MONEV PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Bimbingan Kerja (Bimker) serta Sarana dan Prasarana	TELAH DILAKSANAKAN	
					Rp	45.510.000	Rp	-	TW II	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi dengan Jumlah Narapidana	TW II		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Bimbingan Kerja (Bimker) serta Sarana dan Prasarana			
					Rp	24.448.000	Rp	-	TW III	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi dengan Jumlah Narapidana	TW III		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Bimbingan Kerja (Bimker) serta Sarana dan Prasarana			
					Rp	33.540.000	Rp	-	TW IV	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi dengan Jumlah Narapidana	TW IV		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Bimbingan Kerja (Bimker) serta Sarana dan Prasarana			

		Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	77%	Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif Dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Menjalankan Program Asimilasi Dikali 100%	Melakukan BIMTEK terkait pelaksanaan Kegiatan Kerja Produktif bagi Narapidana	Rp 155.700.000	Rp 52.202.000	Rp 32.636.800	TW I	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif dengan Jumlah Narapidana yang Menjalankan Program	TW I	MELAKUKAN MONEV PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Monev Pelaksanaan Program Asimilasi	TELAH DILAKSANAKAN	
							Rp 45.510.000	Rp -	TW II	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif dengan Jumlah Narapidana yang Menjalankan Program	TW II		Laporan Monev Pelaksanaan Program Asimilasi		
							Rp 24.448.000	Rp -	TW III	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif dengan Jumlah Narapidana yang Menjalankan Program	TW III		Laporan Monev Pelaksanaan Program Asimilasi		
							Rp 33.540.000	Rp -	TW IV	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif dengan Jumlah Narapidana yang Menjalankan Program	TW IV		Laporan Monev Pelaksanaan Program Asimilasi		
19	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	90%	Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran Dibagi dengan Jumlah Penilaian Deprisasi Basan Baran Dikali 100%	Melakukan Pengawasan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan sehing Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	Rp -	Rp -	Rp -	TW I	Melakukan Pengawasan terhadap Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran dengan Jumlah Penilaian	TW I		Laporan Pengawasan Rekomendasi Lelang Basan Baran dengan Jumlah Penilaian Depresiasi Basan Baran		
							Rp -	Rp -	TW II	Melakukan Pengawasan terhadap Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran dengan Jumlah Penilaian	TW II		Laporan Pengawasan Rekomendasi Lelang Basan Baran dengan Jumlah Penilaian Depresiasi Basan Baran		
							Rp -	Rp -	TW III	Melakukan Pengawasan terhadap Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran dengan Jumlah Penilaian	TW III		Laporan Pengawasan Rekomendasi Lelang Basan Baran dengan Jumlah Penilaian Depresiasi Basan Baran		
							Rp -	Rp -	TW IV	Melakukan Pengawasan terhadap Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran dengan Jumlah Penilaian	TW IV		Laporan Pengawasan Rekomendasi Lelang Basan Baran dengan Jumlah Penilaian Depresiasi Basan Baran		
		Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap	100%	Jumlah Benda Sitaan yang Telah Eksekusi Dibagi dengan Jumlah Benda Sitaan yang Telah Inkrah (Berkekuatan Hukum Tetap) Dikali 100%	Melakukan Pengawasan Proses Pengeluaran Benda Sitaan dan Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap	Rp -	Rp -	Rp -	TW I	Melakukan Pengawasan terhadap Benda Sitaan yang Telah Dieksekusi dengan Jumlah Benda Sitaan yang Telah Inkrah (Berkekuatan Hukum	TW I		Laporan Pengawasan Benda Sitaan yang Telah Dieksekusi yang Berkekuatan Hukum Tetap		
							Rp -	Rp -	TW II	Melakukan Pengawasan terhadap Benda Sitaan yang Telah Dieksekusi dengan Jumlah Benda Sitaan yang Telah Inkrah (Berkekuatan Hukum	TW II		Laporan Pengawasan Benda Sitaan yang Telah Dieksekusi yang Berkekuatan Hukum Tetap		
							Rp -	Rp -	TW III	Melakukan Pengawasan terhadap Benda Sitaan yang Telah Dieksekusi dengan Jumlah Benda Sitaan yang Telah Inkrah (Berkekuatan Hukum	TW III		Laporan Pengawasan Benda Sitaan yang Telah Dieksekusi yang Berkekuatan Hukum Tetap		
							Rp -	Rp -	TW IV	Melakukan Pengawasan terhadap Benda Sitaan yang Telah Dieksekusi dengan Jumlah Benda Sitaan yang Telah Inkrah (Berkekuatan Hukum	TW IV		Laporan Pengawasan Benda Sitaan yang Telah Dieksekusi yang Berkekuatan Hukum Tetap		
20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90%	Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan Dibagi Jumlah Pengaduan yang Masuk Dikali 100%	Melakukan Klarifikasi terhadap Laporan Masyarakat yang Masuk pada Laps/Rutan/LPKA	Rp 26.894.000	Rp 6.723.500	Rp -	TW I	Melakukan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan yang Masuk ke Dalam Laps/Rutan/LPKA	TW I		Laporan Pengawasan atas Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat		
							Rp 6.723.500	Rp -	TW II	Melakukan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan yang Masuk ke Dalam Laps/Rutan/LPKA	TW II		Laporan Pengawasan atas Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat		

					Rp 6.723.500	Rp		TW III	Melakukan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan yang Masuk ke Dalam Lapas/Rutan/LPKA	TW III		Laporan Pengawasan atas Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat		
					Rp 6.723.500	Rp		TW IV	Melakukan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan yang Masuk ke Dalam Lapas/Rutan/LPKA	TW IV		Laporan Pengawasan atas Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat		
	Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	90%	Jumlah Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Dibagi Jumlah Seluruh Gangguan Kamtib yang Terjadi Dikali 100%	Melakukan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) terhadap Gangguan Kamtib pada Lapas/Rutan/LPKA Secara Berkala	Rp 297.414.000	Rp 69.508.000	Rp 69.116.400	TW I	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada Lapas/Rutan/LPKA Secara Berkala	TW I	MELAKUKAN SATGAS KAMTIB PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Pengawasan Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban	TELAH DILAKSANAKAN	
					Rp 97.674.000	Rp		TW II	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada Lapas/Rutan/LPKA Secara Berkala	TW II		Laporan Pengawasan Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban		
					Rp 75.968.000	Rp		TW III	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada Lapas/Rutan/LPKA Secara Berkala	TW III		Laporan Pengawasan Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban		
					Rp 54.264.000	Rp		TW IV	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada Lapas/Rutan/LPKA Secara Berkala	TW IV		Laporan Pengawasan Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban		
	Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib yang Mengurangi Pelanggarannya Dibagi Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib Dikali 100%	Melakukan Sidang BAP terhadap Pelaku Gangguan Kamtib pada Lapas/Rutan/LPKA	Rp 297.414.000	Rp 69.508.000	Rp 69.116.400	TW I	Melakukan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) di Lapas/Rutan/LPKA	TW I	MELAKUKAN SATGAS KAMTIB PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan BIMTORWASDAL	TELAH DILAKSANAKAN	
					Rp 97.674.000	Rp		TW II	Melakukan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) di Lapas/Rutan/LPKA	TW II		Laporan BIMTORWASDAL		
					Rp 75.968.000	Rp		TW III	Melakukan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) di Lapas/Rutan/LPKA	TW III		Laporan BIMTORWASDAL		
					Rp 54.264.000	Rp		TW IV	Melakukan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) di Lapas/Rutan/LPKA	TW IV		Laporan BIMTORWASDAL		
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	90%	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%	Melakukan Penambahan Bantuan Regu Jaga Pasca terjadinya Gangguan Kamtib	Rp 297.414.000	Rp 69.508.000	Rp 69.116.400	TW I	Meningkatkan Frekuensi Penggeledahan Rutin dan Insidentil pada Lapas/Rutan/LPKA	TW I	MELAKUKAN SATGAS KAMTIB PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Penggeledahan pada Lapas/Rutan/LPKA	TELAH DILAKSANAKAN	
					Rp 97.674.000	Rp		TW II	Meningkatkan Frekuensi Penggeledahan Rutin dan Insidentil pada Lapas/Rutan/LPKA	TW II		Laporan Penggeledahan pada Lapas/Rutan/LPKA		
					Rp 75.968.000	Rp		TW III	Meningkatkan Frekuensi Penggeledahan Rutin dan Insidentil pada Lapas/Rutan/LPKA	TW III		Laporan Penggeledahan pada Lapas/Rutan/LPKA		
					Rp 54.264.000	Rp		TW IV	Meningkatkan Frekuensi Penggeledahan Rutin dan Insidentil pada Lapas/Rutan/LPKA	TW IV		Laporan Penggeledahan pada Lapas/Rutan/LPKA		
21	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	70%	Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Dibagi Jumlah Klien Usia Produktif Dikali 100%	Melakukan Monitoring Pelaksanaan Pendataan Klien Usia Produktif pada Bapas	Rp 155.700.000	Rp 52.202.000	Rp 47.968.880	TW I	Menginventarisir Perolehan Data Klien Produktif	TW I	MELAKUKAN MONEV PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Klien Usia Produktif dari Divisi Pemasarakatan	TELAH DILAKSANAKAN
					Rp 45.510.000	Rp		TW II	Menginventarisir Data Kegiatan Kemandirian Melalui Griya Abhipraya (Rumah Singgah Milik Bapas)	TW II		Laporan Klien Produktif yang Memperoleh Ketrampilan Kemandirian		
					Rp 24.448.000	Rp		TW III	Menginventarisir Data Klien Produktif yang Telah Bekerja di Luar Lembaga	TW III		Laporan Klien Produktif yang Telah Bekerja di Luar Lembaga		

					Rp 33.540.000	Rp		TW IV	Menginventarisir Data Klien Produktif yang Telah Bekerja di Luar Lembaga	TW IV		Laporan Klien Produktif yang Telah Bekerja di Luar Lembaga		
	Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	Jumlah Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Dibagi Jumlah Pendampingan Anak Dikali 100%	Melakukan Upaya Diversi dengan Melakukan Penguatan pada PK Bapas terhadap Anak Berhadapan Hukum	Rp 155.700.000	Rp 52.202.000	Rp 47.968.880	TW I	Melakukan Monitoring Pendataan Anak Berhadapan dengan Hukum	TW I	MELAKUKAN MONEV PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Monitoring Pendataan Anak Berhadapan dengan Hukum	TELAH DILAKSANAKAN	
					Rp 45.510.000	Rp	-	TW II	Melakukan Penguatan kepada PK Bapas	TW II		Laporan Penguatan Divisi Pemasyarakatan pada PK Bapas		
					Rp 24.448.000	Rp	-	TW III	Melakukan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	TW III		Laporan Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Wilayah		
					Rp 33.540.000	Rp	-	TW IV	Melakukan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	TW IV		Laporan Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Wilayah		
	Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	40%	Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan Dibagi Jumlah Klien Anak Dikali 100%	Melakukan Monitoring Pelaksanaan Pendataan Anak Binaan yang Terpenuhi Hak Pendidikannya pada LPKA	Rp 155.700.000	Rp 52.202.000	Rp 47.968.880	TW I	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	TW I	MELAKUKAN MONEV PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Monitoring dan Evaluasi Hak Pendidikan pada Anak Binaan	TELAH DILAKSANAKAN	
					Rp 45.510.000	Rp	-	TW II	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	TW II		Laporan Monitoring dan Evaluasi Hak Pendidikan pada Anak Binaan		
					Rp 24.448.000	Rp	-	TW III	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	TW III		Laporan Monitoring dan Evaluasi Hak Pendidikan pada Anak Binaan		
					Rp 33.540.000	Rp	-	TW IV	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	TW IV		Laporan Monitoring dan Evaluasi Hak Pendidikan pada Anak Binaan		
22	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengantasan Anak di Wilayah Sesuai Standar	85%	Jumlah Anak yang Terampil Dibagi Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan Dikali 100%	Melakukan Monitoring Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	Rp 155.700.000	Rp 52.202.000	Rp 47.968.880	TW I	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	TW I	MELAKUKAN MONEV PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Monev Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	TELAH DILAKSANAKAN	
					Rp 45.510.000	Rp	-	TW II	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	TW II		Laporan Monev Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat		
					Rp 24.448.000	Rp	-	TW III	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	TW III		Laporan Monev Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat		
					Rp 33.540.000	Rp	-	TW IV	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	TW IV		Laporan Monev Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat		
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Dibagi Jumlah Anak yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Memperoleh Hak Integrasi dikali 100%	Melakukan Monitoring Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi	Rp 155.700.000	Rp 52.202.000	Rp 47.968.880	TW I	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi	TW I	MELAKUKAN MONEV PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Monev Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi	TELAH DILAKSANAKAN	
					Rp 45.510.000	Rp	-	TW II	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi	TW II		Laporan Monev Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi		
					Rp 24.448.000	Rp	-	TW III	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi	TW III		Laporan Monev Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi		
					Rp 33.540.000	Rp	-	TW IV	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi	TW IV		Laporan Monev Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi		
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Dibagi Jumlah Anak Dikali 100%	Melakukan Monitoring Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	Rp 155.700.000	Rp 52.202.000	Rp 47.968.880	TW I	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan	TW I	MELAKUKAN MONEV PADA SATKER PAS DI WILAYAH NTT	Laporan Monev Pendataan Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan	TELAH DILAKSANAKAN	
					Rp 45.510.000	Rp	-	TW II	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan	TW II		Laporan Monev Pendataan Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan		

						Rp	24.448.000	Rp		TW III	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak	TW III		Laporan Monev Pendataan Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan				
						Rp	33.540.000	Rp	-	TW IV	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak	TW IV		Laporan Monev Pendataan Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan				
	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal Dibagi Jumlah Anak Dikali 100%	Melakukan Mutasi/Pemindahan terhadap anak yang ditempatkan pada Lepas dan Rutan ke LPKA	Rp	41.650.000	Rp	-	Rp	-	TW I	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	TW I		Laporan Monev Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal			
							Rp	-	Rp	-	TW II	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	TW II		Laporan Monev Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal			
							Rp	41.650.000	Rp	-	TW III	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	TW III		Laporan Monev Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal			
							Rp	-	Rp	-	TW IV	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	TW IV		Laporan Monev Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal			
23	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	5. Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)	1 UPT	Jumlah UPT yang Dibangun	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	TW I	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembangunan UPT Pemasarakatan	TW I		Laporan Pengawasan Pembangunan UPT Pemasarakatan		
							Rp	-	Rp	-	TW II	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembangunan UPT Pemasarakatan	TW II		Laporan Pengawasan Pembangunan UPT Pemasarakatan			
							Rp	-	Rp	-	TW III	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembangunan UPT Pemasarakatan	TW III		Laporan Pengawasan Pembangunan UPT Pemasarakatan			
							Rp	-	Rp	-	TW IV	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembangunan UPT Pemasarakatan	TW IV		Laporan Pengawasan Pembangunan UPT Pemasarakatan			


 Mengetahui,  
 Kepala Kantor Wilayah  
 Kementerian Hukum dan HAM NTT  
 D. Jone  
 06411261991032001



RENCANA AKSI/KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA AKSI/KEGIATAN		CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN				
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	1. 3,30 INDEKS 2. 3,14 INDEKS	N20-1	Penyelenggaraan Fungsi Pengoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.956.516.000	Rp 551.469.000	Rp 340.920.000	TW I	<b>Bulan Januari 2024</b> 1. Konsultasi dan Koordinasi di Tataran Pusat terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian; 2. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Teknis Keimigrasian di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua; 3. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Teknis Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang; 4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Teknis Keimigrasian di Rumah Setensi Imigrasi Kupang; 5. Pelaksanaan Koordinasi Timpora di Kabupaten Kupang. <b>Bulan Februari 2024</b> 1. Rapat Evaluasi dan Konsolidasi Nasional dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi ke 74 2. Konsultasi dan Koordinasi di Tataran Pusat terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Teknis Keimigrasian; 3. Pulbaket dalam rangka Antisipasi Kerawanan Pemilu di wilayah perbatasan; 4. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Intelijen Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang (Sumba Tengah); 5. Koordinasi Timpora terkait Pelaksanaan	TW I	<b>Bulan Januari 2024</b> 1. Konsultasi dan Koordinasi di Tataran Pusat terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian; 2. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Teknis Keimigrasian di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua; 3. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Teknis Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang; 4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Teknis Keimigrasian di Rumah Setensi Imigrasi Kupang; 5. Pelaksanaan Koordinasi Timpora di Kabupaten Kupang. <b>Bulan Februari 2024</b> 1. Rapat Evaluasi dan Konsolidasi Nasional dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi ke 74 2. Konsultasi dan Koordinasi di Tataran Pusat terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Teknis Keimigrasian; 3. Pulbaket dalam rangka Antisipasi Kerawanan Pemilu di wilayah perbatasan; 4. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Intelijen Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang (Sumba Tengah); 5. Koordinasi Timpora terkait Pelaksanaan	Tersedia Pelaporan dan Dokumentasi Kegiatan	Terlaksana Sesuai Output yang Direncanakan				
									(RENCANA PENARIKAN DANA TW II)	(REALISASI ANGGARAN TW II)	TW II	(RENCANA KEGIATAN TRIWULAN II) CATATAN: PENETAPAN TARGET TIDAK HARUS 1 TAHUN	TW II		(DOKUMENTASI ATAU DATA EVIDENCE PENDUKUNG CAPAIAN)	(STATUS PELAKSANAAN)	(KETERANGAN DETAIL CAPAIAN)
									(RENCANA PENARIKAN DANA TW III)	(REALISASI ANGGARAN TW III)	TW III	(RENCANA KEGIATAN TRIWULAN III) CATATAN: PENETAPAN TARGET TIDAK HARUS 1 TAHUN	TW III		(DOKUMENTASI ATAU DATA EVIDENCE PENDUKUNG CAPAIAN)	(STATUS PELAKSANAAN)	(KETERANGAN DETAIL CAPAIAN)
									(RENCANA PENARIKAN DANA TW IV)	(REALISASI ANGGARAN TW IV)	TW IV	(RENCANA KEGIATAN TRIWULAN IV) CATATAN: PENETAPAN TARGET TIDAK HARUS 1 TAHUN	TW IV		(DOKUMENTASI ATAU DATA EVIDENCE PENDUKUNG CAPAIAN)	(STATUS PELAKSANAAN)	(KETERANGAN DETAIL CAPAIAN)


 Mengetahui,  
 Kepala Kantor Wilayah  
 Kementerian Hukum dan HAM NTT  
  
 Marciana D. Jone  
 NIP. 196411261991032001



RENCANA AKSI/KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA AKSI/KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN
Terfasilitasnya rancangan produk hukum daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	4%	Menetapkan SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi	389.000.000	191.934.800	20.883.740	TW I 1. Melaksanakan Pembagian Wilayah Kerja (Zonas) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Di Kantor Wilayah Kementerian	TW I Kegiatan sudah dilaksanakan dan sudah diterbitkan SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi	SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi	sudah dilaksanakan pada bulan Desember	
terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	5 Orang		Melakukan koordinasi kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota				Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait di daerah dengan Tema "Penguatan Sinergi Yang Semakin Pasti dan Berakhlak Untuk Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berkualitas Serta Berdampak Positif Bagi Masyarakat Menuju Indonesia Emas" yang meliputi 3 (Tiga) Kegiatan yakni : 1. Rapat Koordinasi Fasilitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, 2. Jaring Aspirasi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pidana Adat, dan 3. Promosi dan Indikasi Geografis	KEHORMATAN MENTERI HUKUM DAN HAM, serta Ketua dan Anggota Legislatif serta Pejabat Struktural pada Pemerintahan Daerah	Laporan Kegiatan hasil koordinasi dengan melampirkan: a. dalam hal Kanwil menyelenggarakan kegiatan rapatkoordinasi, data dukung berupa: undangan, daftar hadir, Notula, dan Dokumentasi; b. dalam hal Kanwil datang langsung ke Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, data dukung berupa: Surat tugas, notula dan dokumentasi	kegiatan rakor sudah dilaksanakan pada tanggal 1 maret 2024	
				Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM				Melakukan harmonisasi draft Rancangan Peraturan Daerah	kegiatan proses pengharmonisasian sudah dilaksanakan di Aula Kanwil KEMENKUMHAM NTT yang di hadir oleh para pejabat Struktural pada Provinsi NTT yang menyatakan Ranperda Provinsi NTT belum Harmoni.	Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: Raperda 1) Surat Permohonan Pengharmonisasian; 2) Penjelasan/Keterangan 3) Raperda yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekda dan Pemrakarsa dan Pemrakarsa 4) SK Tim Pembentukan Tim Penyusun Raperda 5) SK Pembentukan Propemperda beserta daftar lampiran Propemperda atau SK Kepuluan bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD yang menyatakan pembentukan rancangan di luar Propemperda. Raperkadia	sudah berjalan	
Terfasilitasnya rancangan produk hukum daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	4%	Menetapkan SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonas) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	389.000.000	44.141.000		TW II 1. Melaksanakan Pembagian Wilayah Kerja (Zonas) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Nusa Tenggara Timur	TW II Akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan		sudah dilaksanakan pada bulan Desember	

terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	5 Orang		Melakukan koordinasi kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota				Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait di daerah dengan Tema "Penguatan Sinergi Yang Semakin Pasti dan Berakhlak Untuk Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berkualitas Serta Berdampak Positif Bagi Masyarakat Menuju Indonesia Emas" yang meliputi 3 (Tiga) Kegiatan yakni : 1. Rapat Koordinasi Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, 2. Jaring Aspirasi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pidana Adat, dan 3. Promosi dan Indikasi Geografis	Akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan			
				Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan				Melakukan harmonisasi draft Rancangan Peraturan	Akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan			
Terfasilitasnya rancangan produk hukum daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	4%	Menetapkan SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	389.000.000	92.753.000		TW II 1. Melaksanakan Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Nusa Tenggara Timur	TW III Akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan			
terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	5 Orang		Melakukan koordinasi kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota				Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait di daerah dengan Tema "Penguatan Sinergi Yang Semakin Pasti dan Berakhlak Untuk Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berkualitas Serta Berdampak Positif Bagi Masyarakat Menuju Indonesia Emas" yang meliputi 3 (Tiga) Kegiatan yakni : 1. Rapat Koordinasi Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, 2. Jaring Aspirasi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pidana Adat, dan 3. Promosi dan Indikasi Geografis	Akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan			
				Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan				Melakukan harmonisasi draft Rancangan Peraturan	Akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan			
Terfasilitasnya rancangan produk hukum daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	4%	Menetapkan SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	389.000.000	46.221.200		TW IV 1. Melaksanakan Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Nusa Tenggara Timur	TW IV Akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan			

terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	5 Orang	Melakukan koordinasi kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota		Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait di daerah dengan Tema "Penguatan Sinergi Yang Semakin Pasti dan Berakhlah Untuk Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berkualitas Serta Berdampak Positif Bagi Masyarakat Menuju Indonesia Emas" yang meliputi 3 (Tiga) Kegiatan yakni ; 1. Rapat Koordinasi Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, 2. Jaring Aspirasi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pidana Adat, dan 3. Promosi dan Indikasi Geografis	Akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan			
			Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan		Melakukan harmonisasi draft Rancangan Peraturan	Akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan			


 Mengetahui,  
 Kepala Kantor Wilayah  
 Kementerian Hukum dan HAM NTT  
 Muziana D. Jone  
 NIP. 196411261991032001

RENCANA AKSI/KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
BIDANG HAK ASASI MANUSIA  
SUB BIDANG PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA AKSI/KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN				
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan HAM di wilayah yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan HAM di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	%Kemanfaatan= (Σ rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan/Σ rekomendasi kebijakan yang dihasilkan) * 100%	MELAKSANAKAN KEBIJAKAN BIDANG HUKUM DAN HAM	Rp 326.810.000	Rp 85.260.000	Rp 63.986.100	TW I	1. MEMBERIKAN REKOMENDASI STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH	TW I	TELAH MELAKSANAKAN Penentuan Judul SIPKUMHAM, Verifikasi Lapangan SIPKUMHAM, Rapat Pengolahan Analisa Data SIPKUMHAM; - Sosialisasi IRH, Verifikasi Lapangan SPAK SPKP	TELAH DILAKSANAKAN	telah terlaksana dengan baik, sedangkan kegiatan belum selesai akan dilaksanakan dalam bulan Maret 2024			
										2. MELAKSANAKAN DISEMINASI HASIL ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH		-	AKAN DILAKSANAKAN			
											Pendampingan IRH ke kab, Penilaian Mandiri IRH, verifikasi lapangan SPAK SPKAP, Rapat Pengolahan Data dan Evaluasi Hasil SPAK SPKP, Rapat presentasi hasil evaluasi SPAK SPKP, Rapat Pembahasan SIPKUMHAM, FGD Evaluasi Kebijakan	TW II	(CAPAIAN TRIWULAN II)	(DOKUMENTASI ATAU DATA EVIDIENCE PENDUKUNG CAPAIAN)	(STATUS PELAKSANAAN)	(KETERANGAN DETAIL CAPAIAN)
											Verifikasi Evaluasi Kebijakan ke Kabupaten, FGD Evaluasi Kebijakan, Diseminasi Kebijakan, Penentuan judul SIPKUMHAM, Verifikasi Lapangan SIPKUMHAM	TW III	(CAPAIAN TRIWULAN III)	(DOKUMENTASI ATAU DATA EVIDIENCE PENDUKUNG CAPAIAN)	(STATUS PELAKSANAAN)	(KETERANGAN DETAIL CAPAIAN)
											Koordinasi SIPKUMHAM/Rakor BSK, Rapat Pengolahan analisa Data SIPKUMHAM, Rapat Pembahasan SIPKUMHAM, Penyampaian Hasil IRH, Verifikasi Tindaklanjuti Evaluasi SPAK SPKP, Evaluasi SIPKUMHAM	TW IV	(CAPAIAN TRIWULAN IV)	(DOKUMENTASI ATAU DATA EVIDIENCE PENDUKUNG CAPAIAN)	(STATUS PELAKSANAAN)	(KETERANGAN DETAIL CAPAIAN)


 Mengetahui,  
 Kepala Kantor Wilayah  
 Kementerian Hukum dan HAM NTT  
 M. Yohana D. Jone  
 NIP. 196411261991032001

RENCANA AKSI/KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA AKSI/KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN													
1	TERWJUDNYA PENGELOLAAN KEANGGOTAAN JDJHN DI WILAYAH	PERSENTASE ANGGOTA JDJHN YANG DIKELOLA TERHADAP TOTAL ANGGOTA JDJHN DI WILAYAH	25%	JUMLAH WEBSITE ANGGOTA JDJHN YANG TERINTEGRASI DIBAGI DENGAN JUMLAH ANGGOTA JDJHN KAU 100%	MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ANGGOTA JDJHN DI WILAYAH	Rp 95.601.000	-	Rp 22.980.000	TW I	1. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI WILAYAH 2. MELAKSANAKAN PROMOSI, PENERBITAN DAN KERJA SAMA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI WILAYAH 3. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN HUKUM	TW I	TELAH DILAKSANAKAN KOORDINASI JDJH DI DAERAH	LAPORAN KOORDINASI JDJH	TELAH DILAKSANAKAN												
									29.466.000						-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA									
									-						-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA									
									Rp 21.452.000						-	-	-	TW II	1. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI WILAYAH 2. MELAKSANAKAN PROMOSI, PENERBITAN DAN KERJA SAMA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI WILAYAH 3. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN HUKUM	TW II						
																		-						-	-	-
																		-						-	-	-
									Rp 15.776.081						-	-	-	TW III	1. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI WILAYAH 2. MELAKSANAKAN PROMOSI, PENERBITAN DAN KERJA SAMA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI WILAYAH 3. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN HUKUM	TW III						
																		-						-	-	-
																		-						-	-	-
									Rp 10.231.919						-	-	-	TW IV	1. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI WILAYAH 2. MELAKSANAKAN PROMOSI, PENERBITAN DAN KERJA SAMA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI WILAYAH 3. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN HUKUM	TW IV						
																		-						-	-	-
																		-						-	-	-
2	Meningkatnya Layanan bantuan hukum di wilayah	PRESENTASE LAYANAN BANTUAN HUKUM LITIGASI YANG DIBERIKAN TERHADAP TOTAL PEMOHON LAYANAN BANTUAN HUKUM LITIGASI	82%	JUMLAH ORANG MISKIN YANG MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM LITIGASI SESUAI PERATURAN BANTUAN HUKUM DIBAGI SELURUH PERMOHONAN BANTUAN HUKUM LITIGASI X 100%	MELAKSANAKAN KEGIATAN BANTUAN HUKUM LITIGASI	Rp 1.080.000.000	-	Rp 122.000.000	TW I	1. MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN DAN UPAYA BANTUAN HUKUM BIASA 2. MELAKSANAKAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA	TW I			-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA											
									-							-	-	AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA								
									-							-	-	-								
-	-	-	-	TW II	1. MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN DAN UPAYA BANTUAN HUKUM BIASA	TW II																				
-	-	-	-	Rp 355.000.000	-	-	-	TW II																		







					Rp	19.274.891			TW IV	2. MELAKSANAKAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN	TW IV				
										3. MELAKSANAKAN PENINGKATAN PEMAHAMAN PENYUSUNAN PROLEGDA DAN					
					Rp	199.851.000			TW I	1. MELAKSANAKAN LAYANAN PENYULUHAN HUKUM DI DAERAH	TW I	TELAH DILAKSANAKAN PENYULUHAN HUKUM DI DAERAH	LAPORAN PENYULUHAN HUKUM DI DAERAH	TELAH DILAKSANAKAN	
					Rp	78.150.000	Rp	35.865.000	TW I	2. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN SADAR		TELAH DILAKSANAKAN PEMBINAAN/ PEMBENTUKAN	LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT KWLOMPOK	TELAH DILAKSANAKAN	
					Rp	57.552.000			TW II	1. MELAKSANAKAN LAYANAN PENYULUHAN HUKUM DI DAERAH	TW II				
										2. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN SADAR HUKUM					
					Rp	41.514.000			TW III	1. MELAKSANAKAN LAYANAN PENYULUHAN HUKUM DI DAERAH	TW III				
										2. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN SADAR HUKUM					
					Rp	22.635.000			TW IV	1. MELAKSANAKAN LAYANAN PENYULUHAN HUKUM DI DAERAH	TW IV				
										2. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN SADAR HUKUM					
					Rp	98.095.000			TW I	MELAKSANAKAN PEMBINAAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI WILAYAH	TW I	TELAH MELAKSANAKAN PEMBINAAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TINGKAT DAERAH	LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI DAERAH	TELAH DILAKSANAKAN	
					Rp	3.620.000	Rp	2.220.000	TW I	MELAKSANAKAN PEMBINAAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI WILAYAH	TW II				
					Rp	50.376.000			TW II	MELAKSANAKAN PEMBINAAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI WILAYAH	TW III				
					Rp	17.112.000			TW III	MELAKSANAKAN PEMBINAAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI WILAYAH	TW IV				
					Rp	26.987.000			TW IV	MELAKSANAKAN PEMBINAAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI WILAYAH					
					Rp	101.195.000			TW I	MELAKSANAKAN KEGIATAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI OBH DI WILAYAH	TW I				AKAN DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN BERIKUTNYA
					Rp	5.299.000			TW I						
					Rp	63.730.056			TW II	MELAKSANAKAN KEGIATAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI OBH DI WILAYAH	TW II				
					Rp	17.948.000			TW III	MELAKSANAKAN KEGIATAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI OBH DI WILAYAH	TW III				
					Rp	14.217.944			TW IV	MELAKSANAKAN KEGIATAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI OBH DI WILAYAH	TW IV				



Mengetahui,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM NTT  
*Mariana D. Jone*  
Mariana D. Jone  
NIP. 196411261991032001

RENCANA AKSI/KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA AKSI/KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN	
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	BAH.001 Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	Rp 334.689.000	Rp 171.439.000		TW I	1 Instansi Pemerintah	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Trivulan IV Tahun 2024	BAH.001: 051 Identifikasi Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 052 Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah  BDB.001: 051 Persiapan Aksi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah 052 Pelaksanaan Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah  FBA.001: 051 Persiapan Aksi HAM di Wilayah 052 Pelaksanaan Aksi HAM di Wilayah	
				Rp 171.439.000				TW II					BAH.001: 052 Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 053 Penyusunan Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah  BDB.001: 051 Persiapan Aksi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah 052 Pelaksanaan Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah  FBA.001: 051 Persiapan Aksi HAM di Wilayah 052 Pelaksanaan Aksi HAM di Wilayah
				Rp 171.439.000				TW III					BAH.001: 052 Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 054 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah  BDB.001: 052 Pelaksanaan Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah 053 Pemantauan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah  FBA.001: 052 Pelaksanaan Aksi HAM di Wilayah
				Rp 171.439.000				TW IV					BAH.001: 052 Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 054 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah  BDB.001: 052 Pelaksanaan Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah 053 Pemantauan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah 054 Pelaporan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah  FBA.001: 052 Pelaksanaan Aksi HAM di Wilayah 053 Evaluasi dan Pelaporan Aksi HAM di wilayah
Jumlah Kab/Kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah	Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM	FBA.003 Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah		Rp 60.860.000	Rp 60.860.000		TW I	-	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Trivulan IV Tahun 2024	FBA.003: 051 Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM	
				Rp 60.860.000				TW II					FBA.003: 051 Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM 052 Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM
				Rp 60.860.000				TW III					FBA.003: 052 Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM
				Rp 60.860.000				TW IV					FBA.003: 052 Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM 053 Pemantauan dan Evaluasi Kab/Kota Peduli HAM

	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	FBA.002 Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	Rp	76.005.000	TW I	FBA.002: 051 Persiapan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah 052 Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	TW I	-	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Trivulan IV Tahun 2024	FBA.002: 051 Persiapan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah 052 Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah
					Rp	76.005.000	TW II	FBA.002: 052 Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	TW II	-	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Trivulan IV Tahun 2024	FBA.002: 052 Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah
					Rp	76.005.000	TW III	FBA.002: 052 Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	TW III	-	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Trivulan IV Tahun 2024	FBA.002: 052 Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah
					Rp	76.005.000	TW IV	FBA.002: 052 Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah 053 Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	TW IV	1 Instansi Pemerintah	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Trivulan IV Tahun 2024	FBA.002: 052 Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah 053 Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	FBA.004 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Berspektrif HAM di Wilayah	Rp	26.385.000	TW I	FBA.004: 051 Identifikasi Rancangan PUU berbasis HAM di Wilayah	TW I	-	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Trivulan IV Tahun 2024	FBA.004: 051 Identifikasi Rancangan PUU berbasis HAM di Wilayah
					Rp	26.385.000	TW II	FBA.004: 051 Identifikasi Rancangan PUU berbasis HAM di Wilayah 052 Perumusan Rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah	TW II	1 Rekomendasi	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Trivulan IV Tahun 2024	FBA.004: 051 Identifikasi Rancangan PUU berbasis HAM di Wilayah 052 Perumusan Rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah
					Rp	26.385.000	TW III	FBA.004: 051 Identifikasi Rancangan PUU berbasis HAM di Wilayah 052 Perumusan Rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah 053 Pemantauan dan Evaluasi hasil rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah	TW III	1 Rekomendasi	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Trivulan IV Tahun 2024	FBA.004: 051 Identifikasi Rancangan PUU berbasis HAM di Wilayah 052 Perumusan Rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah 053 Pemantauan dan Evaluasi hasil rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah
					Rp	26.385.000	TW IV	FBA.004: 052 Perumusan Rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah 053 Pemantauan dan Evaluasi hasil rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah	TW IV	1 Rekomendasi	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Trivulan IV Tahun 2024	FBA.004: 052 Perumusan Rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah 053 Pemantauan dan Evaluasi hasil rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah


  
 Mengetahui,  
 Kepala Kantor Wilayah  
 Kementerian Hukum dan HAM NTT  
  
 Muziana D. Jone  
 NIP. 196411261991032001

RENCANA AKSI/KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA AKSI/KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN	
Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks	Hasil Survei terhadap Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Rp 1.694.695.000	Rp 379.993.572	137.848.480	BDC.001: Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 002: Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 003: Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW I	Telah dilaksanakannya rencana kegiatan Fasilitasi dan pembinaan masyarakat sesuai rencana kegiatan yang telah dibuat	Lap kegiatan workshop promosi dan diseminasi KI di Kab Alor, Lap pendampingan pengajuan permohonan KI di Kab Belu, dan terselesaikannya permohonan KI di Kab Belu, dan Koordinasi dengan unit Es I di daerah (Malaka dan Ngada)	Telah dilaksanakan	
						Rp 480.168.144		BDC.001: Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 002: Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 003: Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW II		akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan		
						Rp 597.550.267		BDC.001: Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 002: Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 003: Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW III		akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan		
						Rp 236.983.017		BDC.001: Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 002: Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 003: Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW IV		akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan		
				Pemantauan Produk	Rp 210.934.000	Rp -	19.517.000	BKB.001: Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW I	Telah dilaksanakan kegiatan pemantauan produk	laporan pengawasan indikasi geografis di Kab Ngada	Telah dilaksanakan	
						Rp 75.547.999	-	BKB.001: Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW II		akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan		
						Rp 20.422.000	-	BKB.001: Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW III		akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan		
						Rp 114.964.000	-	BKB.001: Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW IV		akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan		

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di Wilayah	Presentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/ edukasi tentang KI di Wilayah	70%	Jumlah Masyarakat yang Memahami KI Dibagi Total Masyarakat yang Mendapatkan Diseminasi/ Edukasi KI Dikali 100%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Rp	1.694.695.000	Rp	379.993.572	137.848.480	BDC.001: Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 002: Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 003: Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW I	Telah dilaksanakannya rencana kegiatan Fasilitasi dan pembinaan masyarakat sesuai rencana kegiatan yang telah dibuat	Lap kegiatan workshop promosi dan diseminasi KI di Kab Alor, Lap pendampingan pengajuan permohonan KI di Kab Belu, dan terseleskannya permohonan KI di Kab Belu, dan Koordinasi dengan unit Es I di daerah (Malaka dan Ngada)	Telah dilaksanakan	
					Rp	480.168.144		BDC.001: Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 002: Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW II		akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan				
					Rp	597.550.267		BDC.001: Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 002: Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 003: Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW III		akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan				
					Rp	236.983.017		BDC.001: Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 002: Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 003:	TW IV		akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan				
					Pemantauan Produk	Rp	210.934.000	Rp	-	19.517.000	BKB.001: Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah		Telah dilaksanakan kegiatan pemantauan produk	laporan pengawasan indikasi geografis di Kab Ngada	Telah dilaksanakan
					Rp	75.547.999		BKB.001: Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW II		akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan				
					Rp	20.422.000		BKB.001: Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW III		akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan				
Rp	114.964.000		BKB.001: Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW IV		akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan									
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di Wilayah	Presentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah	17%	Selisih Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun Berjalan dengan Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun Sebelumnya Dibagi Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun Sebelumnya Dikali 100%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Rp	1.694.695.000	Rp	379.993.572	137.848.480	BDC.001: Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 002: Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 003: Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW I	Telah dilaksanakannya rencana kegiatan Fasilitasi dan pembinaan masyarakat sesuai rencana kegiatan yang telah dibuat	Lap kegiatan workshop promosi dan diseminasi KI di Kab Alor, Lap pendampingan pengajuan permohonan KI di Kab Belu, dan terseleskannya permohonan KI di Kab Belu, dan Koordinasi dengan unit Es I di daerah (Malaka dan Ngada)	Telah dilaksanakan	
					Rp	480.168.144		BDC.001: Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 002: Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW II		akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan				
					Rp	597.550.267		BDC.001: Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 002: Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 003: Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW III		akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan				

					Rp 236.983.017		BDC.001: Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 002: Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah BDC 003: Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW IV			akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan	
			Pemantauan Produk	Rp 210.934.000	Rp -	19.517.000	BKB.001: Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah		Telah dilaksanakan kegiatan pemantauan produk	laporan pengawasan indikasi geografis di Kab Ngada	Telah dilaksanakan	
					Rp 75.547.999		BKB.001: Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW II			akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan	
					Rp 20.422.000		BKB.001: Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW III			akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan	
					Rp 114.964.000		BKB.001: Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW IV			akan dilaksanakan sesuai rencana kegiatan	


 Mengetahui,  
 Kepala Kantor Wilayah  
 Kementerian Hukum dan HAM NTT  
  
 Muziana D. Jone  
 NIP. 196411261991032001